



# Migrasi Manusia dan Penyelundupan Manusia sebagai Ancaman Keamanan Nasional di Indonesia: Perspektif Kriminologi

Achmad Fadjar Romadhani<sup>1</sup>, Afsal Hilal Hamdi<sup>2</sup>, Aldrian Kurniawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Imigrasi, Indonesia

E-mail: [achmadfadjar12@gmail.com](mailto:achmadfadjar12@gmail.com), [afsalhilal30@gmail.com](mailto:afsalhilal30@gmail.com), [aldriankurniawan226@gmail.com](mailto:aldriankurniawan226@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-12-03 Revised: 2023-01-15 Published: 2024-02-06	The problem of human migration and human smuggling is a threat to national security in Indonesia from a criminological perspective. Human migration has become an increasingly pressing issue in Indonesia due to external and internal factors that influence human movement. The continued phenomenon of illegal migration and human smuggling has raised serious concerns regarding national security stability. This research explores the root causes of illegal human migration and human smuggling in Indonesia and their impact on national security. Using a criminological approach, this research analyzes the social, economic and political factors that encourage individuals to engage in these activities. The research results show that illegal human migration and human smuggling result in various negative consequences, including human rights violations, increased transnational crime, and vulnerability to external security threats. In this context, understanding criminology can provide valuable insights in formulating more effective policies to address these challenges.
<b>Keywords:</b> <i>Migration;</i> <i>Criminology;</i> <i>Smuggling;</i> <i>Illegal;</i> <i>Policies.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-12-03 Direvisi: 2023-01-15 Dipublikasi: 2024-02-06	Masalah migrasi manusia dan penyelundupan manusia merupakan ancaman terhadap keamanan nasional di Indonesia dalam perspektif kriminologi. Migrasi manusia telah menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia karena faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pergerakan manusia. Keberlanjutan fenomena migrasi ilegal dan penyelundupan manusia telah memicu kekhawatiran serius terkait dengan stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menggali akar penyebab migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia di Indonesia serta dampaknya terhadap keamanan nasional. Dengan menggunakan pendekatan kriminologi, penelitian ini menganalisis faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, peningkatan kejahatan transnasional, dan kerentanan terhadap ancaman keamanan eksternal. Dalam konteks ini, pemahaman kriminologi dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan ini.
<b>Kata kunci:</b> <i>Migrasi;</i> <i>Kriminologi;</i> <i>Penyelundupan;</i> <i>Ilegal;</i> <i>Kebijakan.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia telah menjadi salah satu permasalahan yang semakin mendesak dan kompleks di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menciptakan tantangan bagi individu yang terlibat, tetapi juga menghasilkan dampak yang meluas terhadap stabilitas keamanan nasional. Di Indonesia, negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat besar dan beragam pelabuhan serta perairan strategis, migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan dan keamanan negara.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan sejumlah pelabuhan strategis, menjadi salah satu jalur utama bagi

migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada warga negara Indonesia, tetapi juga melibatkan individu dari berbagai negara, memperumit masalah ini dengan beragam latar belakang sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda.

Migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia di Indonesia adalah masalah serius yang memerlukan pemahaman mendalam dan pendekatan lintas sektor yang terkoordinasi. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan ini dari sudut pandang kriminologi yang lebih luas. Permasalahan ini semakin rumit dengan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia, termasuk faktor sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Selain itu, peran

jaringan kriminal internasional juga telah memperdalam masalah ini, menciptakan tantangan yang signifikan bagi penegakan hukum dan pemerintah dalam mengatasi fenomena ini.

Dalam konteks ini, pendekatan kriminologi menawarkan pandangan yang berharga dalam memahami akar penyebab, dinamika, serta dampak dari migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia. Kriminologi memungkinkan kita untuk melihat fenomena ini dari perspektif yang lebih luas, mencakup faktor-faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam praktik ini dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk dengan menguatkan kerja sama internasional dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Meskipun demikian, tantangan besar tetap ada, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah ini adalah kunci untuk mengembangkan strategi yang lebih baik dalam menghadapinya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam fenomena migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia di Indonesia dengan menggunakan perspektif kriminologi. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang akar penyebab, dampak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambilan kebijakan, penegakan hukum, dan masyarakat internasional dalam mengatasi ancaman keamanan nasional yang dihadapi oleh Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian mengenai Migrasi Manusia Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Ancaman Keamanan Nasional Di Indonesia: Perspektif Kriminologi ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan pendapat tiap-tiap anggota keluarga pasti berbeda-beda. Dan juga karena sifat dari pendekatan kualitatif yang mengatakan bahwa realitas bersifat ganda, rumit, dinamis, dan kebenaran realitas bersifat dinamis. (Mulyana, 2013:147). Selain itu, penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan

melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15).

Menurut Jane Richie (dalam Moleong, 2012) penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Dalam perkembangannya, penelitian kualitatif juga mendapat keraguan dari para peneliti positivis. Menurut mereka penelitian kualitatif tidak bisa dikategorikan penelitian ilmiah, karena tidak memiliki data yang akurat. Namun para peneliti post- positivis yang meluruskan pandangan tersebut. Penelitian kualitatif dengan paradigma post positivis melihat sebuah realitas dengan lebih dalam, tidak hanya dipermukaan sebuah realitas tersebut melainkan hingga pemaknaan dan motif realitas itu. Selain itu, meneliti fenomena tersebut tidak bisa perbagian, karena realitas sifatnya adalah suatu bagian yang utuh (holistik).

Untuk menjawab keraguan tersebut, maka penelitian kualitatif menggunakan dasar pendekatan alamiah pada setiap pengumpulan data dan pengolahan data yang didapat dari sumber informasi. David Williams (1995) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Migrasi dan Penyelundupan Manusia

Migrasi manusia adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain (Laily, 2022). Berikut ini penyebab-penyebab terjadinya migrasi manusia:

#### 1. Bencana Alam

Bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa, dan wabah penyakit dapat mendorong penduduk untuk melakukan migrasi ke daerah yang aman. Contohnya, banyak penduduk Aceh yang tidak ingin tinggal di Aceh setelah bencana alam tsunami. Mereka dapat berpindah ke daerah lain yang dianggap lebih aman untuk melanjutkan kehidupan.

## 2. Ekonomi

Seseorang yang berada dalam kesulitan ekonomi pada suatu daerah tempat tinggalnya mendorong terjadinya migrasi ke daerah lain untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

## 3. Agama

Kebebasan beribadah sesuai agama yang dianut dan sikap saling menghargai antar umat beragama merupakan modal seseorang untuk tetap bertahan dalam lingkungan masyarakat yang heterogen. Apabila kehidupan beragama tidak terjamin bagi kelangsungan dan keamanannya, maka hal itu akan mendorong seseorang melakukan migrasi.

## 4. Politik

Kondisi politik yang memanas di suatu daerah dapat menyebabkan perbuatan anarkis. Akibatnya, penduduk daerah tersebut merasa ingin pindah ke daerah lain yang lebih aman. Selain itu, terdapat faktor pendorong migrasi seperti ketersediaan sumber daya, lapangan kerja, sarana pendidikan, stabilitas dan keamanan, serta alasan pekerjaan.

Konsep migrasi manusia dan penyelundupan manusia adalah dua fenomena yang secara mendalam memengaruhi pergerakan individu di seluruh dunia. Migrasi manusia, secara umum, merujuk pada perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam negeri maupun lintas batas negara. Migrasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pencarian pekerjaan, konflik, perubahan iklim, atau faktor ekonomi dan sosial lainnya. Ini adalah refleksi dari dinamika sosial yang kompleks di berbagai negara dan wilayah.

Di sisi lain, penyelundupan manusia adalah konsep yang berkaitan erat dengan migrasi ilegal, di mana individu atau kelompok yang tidak sah memfasilitasi pergerakan manusia melintasi batas-batas negara. Hal ini seringkali melibatkan pemanfaatan kerentanan individu yang mencari perubahan kondisi hidup atau melarikan diri dari ancaman yang mengintai. Penyelundupan manusia sering terkait dengan aktivitas kriminal yang melibatkan jaringan lintas batas yang kompleks, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi. Dari perspektif peraturan hukum di Indonesia, penyelundupan manusia merupakan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung

maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013).

Dalam hal keberadaan praktik penyelundupan manusia, organisasi internasional sebesar PBB bahkan mengeluarkan Protokol Melawan Penyelundupan Manusia Melalui Darat, Laut dan Udara mengidentifikasi penyelundupan manusia sebagai pengadaaan, untuk mendapatkan langsung atau tidak langsung, finansial atau keuntungan material lainnya, dari masuknya orang secara ilegal ke suatu negara di mana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetap. Konsep migrasi manusia dan penyelundupan manusia memiliki implikasi yang sangat luas dalam dunia kontemporer yang terhubung erat dan kompleks. Migrasi manusia adalah fenomena global yang telah ada sepanjang sejarah manusia. Ini muncul sebagai respons terhadap berbagai tekanan dan peluang yang ada di berbagai wilayah dunia. Seiring perkembangan globalisasi dan mobilitas, migrasi manusia telah menjadi semakin heterogen dalam hal motif, jenis, dan dampak yang dihasilkan.

Migrasi manusia dan penyelundupan manusia tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi politik, budaya, dan keamanan. Dalam konteks keamanan nasional, praktik penyelundupan manusia dapat membuka pintu bagi masuknya aktor-aktor berbahaya, termasuk teroris atau pelaku kejahatan transnasional lainnya. Selain itu, penanganan migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia juga menghadirkan tantangan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap individu yang terlibat. Dalam rangka memahami sepenuhnya fenomena ini, diperlukan pendekatan multidisiplin yang

menggabungkan aspek kriminologi, ilmu sosial, hukum, dan kebijakan publik. Kriminologi, dengan fokusnya pada analisis penyebab kejahatan dan perilaku kriminal, dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia serta cara-cara untuk mengatasi tantangan ini dengan lebih efektif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konsep migrasi manusia dan penyelundupan manusia menjadi penting dalam upaya merumuskan kebijakan yang tepat dan langkah-langkah penanganan yang berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional.

### **B. Teori Kriminologi yang Berkaitan dengan Migrasi Manusia Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Ancaman Keamanan Nasional Di Indonesia**

Teori Anomie (Strain Theory) merupakan teori yang penulis kaitkan dengan pembahasan pada jurnal ini. Teori anomie, yang dikembangkan oleh Émile Durkheim dan kemudian diperluas oleh Robert K. Merton, menyoroti hubungan antara ketidaksetaraan sosial, tekanan untuk mencapai tujuan sosial yang mungkin sulit dijangkau, dan potensi terjadinya perilaku penyimpangan atau kriminal. Dalam konteks migrasi manusia dan penyelundupan manusia di Indonesia, teori anomie bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketidaksetaraan Ekonomi: Ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan di antara berbagai kelompok di masyarakat Indonesia bisa menjadi faktor yang mendorong migrasi manusia. Kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan atau dengan akses terbatas ke peluang ekonomi mungkin merasa terpinggirkan. Ini dapat menciptakan tekanan untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mencari migrasi ke tempat yang menawarkan peluang ekonomi lebih baik.
2. Perbedaan Antara Tujuan dan Sarana: Teori anomie menekankan perbedaan antara tujuan yang diinginkan oleh individu (misalnya, kemakmuran, keamanan, atau kesejahteraan) dan sarana yang sah yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Jika individu merasa bahwa sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut tidak tersedia atau terlalu sulit dijangkau, mereka mungkin mencari alternatif yang melibatkan tindakan ilegal,

seperti migrasi ilegal atau menggunakan penyelundupan manusia.

3. Peran Norma Sosial: Norma sosial juga memainkan peran penting dalam teori anomie. Dalam kasus migrasi dan penyelundupan manusia, norma sosial yang mempromosikan kemampuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga dan masyarakat dapat mendorong individu untuk mencari solusi di luar batas hukum. Norma sosial yang membenarkan tindakan ilegal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat menjadi faktor pendorong.
4. Solusi Kebijakan: Dalam konteks teori anomie, solusi kebijakan mungkin melibatkan upaya untuk dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, meningkatkan akses ke sarana yang sah untuk mencapai tujuan, dan mempromosikan norma sosial yang mendukung perilaku yang legal dan etis. Selain itu, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang memberikan peluang ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat dan mengatasi ketidaksetaraan ekonomi sebagai faktor yang mendorong migrasi manusia dan penyelundupan manusia.

Teori anomie memberikan perspektif yang penting dalam memahami bagaimana tekanan sosial dan ekonomi dapat berkontribusi pada migrasi manusia dan tindakan penyelundupan manusia sebagai upaya individu untuk mengatasi ketidaksetaraan dan mencapai tujuan yang dianggap penting. Dengan pemahaman ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi ancaman keamanan nasional yang mungkin terkait dengan tindakan ini.

### **C. Perspektif Kriminologi dalam Studi Migrasi dan Penyelundupan Manusia**

Perspektif kriminologi dalam studi migrasi dan penyelundupan manusia merupakan pendekatan analitis yang berfokus pada pemahaman lebih dalam tentang fenomena ini melalui lensa kejahatan, perilaku kriminal, dan faktor-faktor kriminologis yang mendorong individu terlibat dalam aktivitas tersebut. Kriminologi menawarkan alat analisis yang berharga untuk mengidentifikasi akar penyebab serta mengurai dinamika migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia.

Salah satu kontribusi utama kriminologi adalah dalam mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mendorong individu untuk terlibat dalam migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia. Ini mencakup aspek-aspek seperti ketidaksetaraan ekonomi, konflik bersenjata, perubahan iklim, dan juga keterlibatan jaringan kriminal internasional. Pendekatan kriminologi juga memungkinkan kita untuk melihat bagaimana motivasi ekonomi, peluang, atau tekanan sosial dapat menjadi faktor utama yang mempengaruhi individu untuk mencari jalur ilegal dalam migrasi mereka. Dalam hal penyelundupan manusia, pendekatan kriminologi mengarah pada pemahaman mendalam tentang bagaimana jaringan kriminal beroperasi untuk memfasilitasi pergerakan ilegal individu. Ini melibatkan analisis bagaimana penyelundup manusia mengatur rute, transportasi, dan dokumentasi palsu untuk menghindari otoritas yang berwenang. Selain itu, kriminologi juga memungkinkan kita untuk memahami aspek-aspek lain dari aktivitas ilegal ini, seperti perdagangan manusia dan eksploitasi terhadap korban.

Selain itu, perspektif kriminologi membantu dalam menganalisis pola-pola perilaku kriminal yang terkait dengan penyelundupan manusia, termasuk bagaimana jaringan kriminal beroperasi, rute migrasi ilegal yang digunakan, serta bagaimana individu diperdagangkan dan dieksploitasi. Ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana penyelundupan manusia dapat menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi para pelaku kriminal. Dalam pengembangan kebijakan, perspektif kriminologi dapat mengarah pada pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia. Ini termasuk pendekatan pencegahan yang berfokus pada akar penyebab migrasi ilegal, serta penegakan hukum yang efektif dan perhatian terhadap hak asasi manusia korban. Keseluruhan, perspektif kriminologi membantu kita memahami bahwa migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia bukan hanya masalah hukum, tetapi juga fenomena yang sangat terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kriminal yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan juga berkelanjutan.

Pemahaman aspek-aspek kriminologis ini penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi migrasi manusia

ilegal dan penyelundupan manusia. Dengan melihat fenomena ini dari sudut pandang kriminologi, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengembangkan strategi yang lebih terinformasi untuk pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, perspektif kriminologi juga membantu dalam merancang solusi yang lebih holistik untuk masalah ini, yang melibatkan kerja sama internasional dan lintas-sektor yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleks migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia di era kontemporer.

Jika kita tinjau pada perspektif pelaksanaan suatu kejahatan (kriminologi), penyelundupan dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi baik melalui jalur Negara perantara maupun langsung. Semakin meningkatnya secara signifikan aktivitas kelompok kejahatan terorganisir dalam terjadinya penyelundupan manusia, dapat membahayakan Negara-negara dan kehidupan serta keselamatan para migran itu sendiri. Setidaknya ada dua peran dalam penyelundupan manusia, yakni sebagai otak penyelundupan yang bersifat pasif dan berada di negara asal, dan ada yang berperan sebagai agen penyelundupan yang bersifat aktif berada di negara transit atau negara tujuan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa penyelundupan manusia adalah kejahatan yang terstruktur ((IOM), 2012).

#### **D. Akar Penyebab Migrasi Manusia dan Penyelundupan Manusia**

Akar penyebab migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia adalah beragam dan kompleks, melibatkan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Salah satu faktor utama adalah ketidaksetaraan ekonomi, di mana individu dan keluarga mencari peluang ekonomi yang lebih baik di tempat lain yang dianggap mampu memberikan kehidupan yang lebih layak. Disparitas pendapatan antara negara-negara dapat memicu migrasi ekonomi, di mana individu mencari pekerjaan yang lebih baik atau peluang bisnis di negara tujuan.

Penyebab migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia melibatkan faktor-faktor yang berasal dari berbagai dimensi sosial, ekonomi, politik, serta kemajuan dalam teknologi dan komunikasi. Secara sosial, ketidakstabilan lingkungan sosial, seperti konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia, dapat memaksa individu untuk

melarikan diri dari negara mereka untuk mencari kehidupan yang lebih aman. Selain itu, pengaruh keluarga dan jaringan sosial seringkali memainkan peran penting dalam keputusan migrasi, dengan individu yang merasa terdorong untuk bergabung dengan keluarga atau teman-teman yang telah sukses bermigrasi.

Namun perlu ditelaah juga kaitannya dengan peran korban yang berkorelasi dengan perbuatan yang dilakukan korban sendiri dalam kasus penyelundupan manusia. Bahkan antara korban dan pelaku ada seringkali ditemukan hubungan kasualitas. Namun dalam UNTOC dan Protokolnya tidak memberikan batasan terhadap korban yang berhak memperoleh perlindungan. Para imigran gelap dapat berlindung di bawah UNTOC dan protokolnya sehingga lepas dari tuntutan hukum Indonesia. Bahkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 86 menyatakan bahwa ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Dan juga pada pasal 136 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf (b), Pasal 123 huruf (b) dan Pasal 126 huruf (a) dan (b) tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Hal ini menjadikan seolah-olah korban penyelundupan manusia kebal terhadap hukum khususnya pada pidana keimigrasian tanpa melihat sejauhmana keterlibatan korban dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia (Akbar, 2021).

Dalam aspek ekonomi, ketidaksetaraan ekonomi antar negara dan kesenjangan sosial dalam suatu masyarakat dapat mendorong individu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negara mereka. Peluang ekonomi yang lebih besar di negara tujuan menjadi faktor pendorong utama migrasi ekonomi, terutama ketika penghasilan di negara asal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Aspek politik juga memainkan peran kunci dalam migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia. Ketidakstabilan politik, perubahan rezim, dan pelanggaran hak asasi manusia dapat menciptakan tekanan besar pada individu untuk melarikan diri dari konflik dan represi politik. Selain itu, kebijakan imigrasi yang ketat di beberapa negara dapat mendorong individu untuk

mencari jalur ilegal untuk masuk dan tinggal di negara tujuan.

Pengaruh teknologi dan komunikasi modern juga memainkan peran dalam dinamika migrasi. Internet dan media sosial memfasilitasi pertukaran informasi tentang rute, peluang pekerjaan, dan perantara penyelundupan manusia. Teknologi juga memungkinkan komunikasi yang lebih mudah antara keluarga yang terpisah oleh migrasi, yang dapat menjadi faktor yang mendorong individu untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Pemahaman terhadap akar penyebab yang berasal dari faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan komunikasi ini menjadi penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia. Hal ini memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam pencegahan, perlindungan, dan penanganan fenomena ini dengan berdasarkan pemahaman yang komprehensif tentang penyebab dan dampaknya.

Berbicara akar penyebab penyelundupan manusia, maka modus yang paling sering dilakukan oleh penyelundup manusia adalah menyelundupkan para korban tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Hal ini tentu untuk menghindari pemeriksaan oleh Petugas dan lebih memudahkan untuk menyelundupkan lebih banyak orang. Penyelundupan menggunakan alat pengangkut yang legal akan lebih menyulitkan bagi para penyelundup dan korban untuk masuk ke wilayah negara tujuan. Karena dengan menggunakan alat angkut legal, keamanan akan lebih ketat dan tentunya harus melewati pemeriksaan keimigrasian. Sehingga para penyelundup lebih sering menggunakan alat angkut ilegal dan melalui jalur ilegal yang minim pengamanan dari petugas.

Para korban secara sadar dan sengaja untuk naik ke alat angkut ilegal ini. Mereka tahu kalau akan diselundupkan melalui jalur ilegal yang tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian. Tindakan para korban ini memang dikehendaki oleh si para korban untuk terjadi agar penyelundupan manusia atas dirinya dapat terlaksana (Akbar, 2021).

#### **E. Dampak Terhadap Keamanan Nasional**

Dampak migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia terhadap hak asasi

manusia adalah salah satu aspek yang paling mendalam dan seringkali paling mengkhawatirkan dari fenomena ini. Aktivitas penyelundupan manusia seringkali melibatkan eksploitasi dan penindasan yang serius terhadap individu yang terlibat, dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Korban penyelundupan manusia dapat mengalami perbudakan modern, pelecehan seksual, kerja paksa, dan kondisi hidup yang mengerikan.

Selain itu, migrasi manusia ilegal juga dapat menghadirkan risiko serius terhadap hak asasi manusia. Individu yang berpindah secara ilegal mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, atau perlindungan hukum. Mereka juga dapat menjadi rentan terhadap eksploitasi oleh majikan yang memanfaatkan status mereka yang tidak sah.

Dampak ini tidak hanya memengaruhi hak asasi manusia individu yang terlibat dalam migrasi ilegal atau penyelundupan manusia, tetapi juga menciptakan tantangan serius bagi hak asasi manusia secara keseluruhan. Negara-negara yang menghadapi masalah ini harus berjuang untuk menjaga keseimbangan antara menjaga keamanan nasional dan memastikan perlindungan hak asasi manusia para pelaku migrasi yang seringkali sangat rentan. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan pendekatan yang holistik yang tidak hanya menangani aspek keamanan nasional, tetapi juga memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia individu. Ini melibatkan upaya dalam mengidentifikasi dan melindungi korban penyelundupan manusia, memastikan akses mereka ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan kebijakan yang sesuai dengan hak asasi manusia yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam penanganan masalah ini.

Migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia memiliki dampak serius pada peningkatan kejahatan transnasional. Aktivitas penyelundupan manusia seringkali terkait erat dengan jaringan kriminal internasional yang beroperasi di lintas batas negara. Para pelaku kejahatan ini, selain menyelundupkan manusia, sering juga terlibat dalam kegiatan lain yang melanggar hukum, seperti perdagangan narkoba, senjata, dan barang-barang ilegal lainnya. Fenomena ini menciptakan keterkaitan antara berbagai

jenis kejahatan transnasional yang dapat mengganggu keamanan nasional.

Untuk mengatasi dampak ini terhadap keamanan nasional, negara-negara perlu mengambil langkah-langkah yang lebih serius dalam mengintensifkan kerja sama internasional dalam penegakan hukum, serta memperkuat perangkat hukum dan institusi dalam negeri untuk melawan kejahatan transnasional yang terkait dengan migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia. Ini mencakup peningkatan pelatihan dan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik, dan peran yang lebih aktif dalam kerja sama internasional dalam memerangi jaringan kriminal yang merugikan hak asasi manusia dan mengancam keamanan nasional.

Dampak migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia terhadap keamanan nasional juga menciptakan kerentanan terhadap ancaman eksternal. Aktivitas penyelundupan manusia, terutama ketika melibatkan jaringan kriminal internasional, dapat membuka pintu bagi infiltrasi aktor-aktor berbahaya dari luar negeri. Teroris, pelaku kejahatan terorganisir, atau bahkan agen negara asing dapat memanfaatkan jalur penyelundupan manusia yang lemah untuk menyusup tanpa terdeteksi. Dalam beberapa kasus, ini dapat mengakibatkan ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk serangan teroris atau aktivitas mata-mata yang merugikan negara. Untuk mengatasi kerentanan terhadap ancaman eksternal ini, negara-negara perlu memperkuat sistem keamanan perbatasan mereka, meningkatkan kerja sama internasional dalam berbagi informasi intelijen, dan memperkuat mekanisme penegakan hukum yang memungkinkan deteksi dan penahanan individu yang dapat menjadi ancaman. Ini adalah tantangan kompleks yang membutuhkan kerja sama antarnegara dan strategi yang matang untuk menjaga keamanan nasional sambil tetap menghormati hak asasi manusia individu yang sah dalam proses migrasi.

Migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia terhadap kerentanan terhadap ancaman eksternal dapat menciptakan tantangan yang semakin kompleks dalam mengamankan keamanan nasional. Salah satu isu utama adalah risiko infiltrasi oleh aktor-aktor asing yang berpotensi merusak stabilitas dan keamanan suatu negara. Dalam konteks ini, penyelundupan manusia dapat

menjadi sarana bagi mata-mata asing atau kelompok teroris untuk menyusup tanpa terdeteksi, menciptakan risiko serius bagi negara penerima.

Selain itu, peningkatan migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia juga dapat menguras sumber daya keamanan nasional. Upaya untuk mengatasi dan mengawasi aliran migran ilegal memerlukan pengalokasian sumber daya yang signifikan dari aparat penegak hukum dan lembaga keamanan, yang pada gilirannya dapat melemahkan kemampuan untuk merespons ancaman eksternal. Peningkatan migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia juga dapat menguras sumber daya keamanan nasional. Upaya untuk mengatasi dan mengawasi aliran migran ilegal memerlukan pengalokasian sumber daya yang signifikan dari aparat penegak hukum dan lembaga keamanan, yang pada gilirannya dapat melemahkan kemampuan untuk merespons ancaman eksternal.

Kerentanan terhadap ancaman eksternal juga dapat memengaruhi dinamika geopolitik di tingkat regional dan internasional. Negara-negara yang menjadi tujuan utama migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia dapat mendapat tekanan politik dan diplomatik dari negara-negara lain yang mungkin merasa terancam oleh aliran migran atau oleh jaringan penyelundupan yang beroperasi di wilayah mereka.

Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mengamankan keamanan nasional mereka. Ini termasuk peningkatan kerja sama regional dan internasional dalam berbagi intelijen dan informasi, perkuatan infrastruktur keamanan perbatasan, dan upaya dalam pencegahan dan penanganan penyelundupan manusia dan aktivitas ilegal terkait migrasi. Keseluruhan, mengatasi kerentanan terhadap ancaman eksternal yang berkaitan dengan migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan juga kolaboratif dalam mengamankan keamanan nasional dan memastikan keberlanjutan kerjasama internasional.

Dalam beberapa kasus, migrasi manusia ilegal dapat memengaruhi sikap politik dalam negeri. Munculnya isu-isu migrasi dalam politik domestik dapat mempengaruhi arah kebijakan dan pandangan masyarakat terhadap masalah ini. Ini dapat menciptakan perpecahan dalam masyarakat dan mem-

pengaruhi proses demokratisasi. Selain itu, implikasi terhadap keamanan nasional juga dapat mencakup dampak ekonomi. Pemerintah mungkin harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mengatasi tantangan migrasi ilegal dan penyelundupan manusia, yang dapat mengurangi anggaran untuk sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Hal ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Implikasi dari migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia terhadap keamanan nasional juga berdampak pada perubahan dalam dinamika politik dan diplomatik. Negara-negara yang menjadi tujuan utama migrasi ilegal dapat merasa tertekan oleh aliran migran dan ancaman yang muncul. Ini dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan bilateral antara negara-negara yang terlibat. Pemerintah mungkin merasa perlu untuk merespons permintaan masyarakat mereka terkait migrasi dengan mengambil tindakan yang mungkin bertentangan dengan kebijakan luar negeri mereka atau perjanjian internasional yang ada.

Dalam menghadapi implikasi ini, negara-negara harus mengembangkan kebijakan yang komprehensif yang mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, pencegahan penyelundupan manusia, dan penanganan korban. Kerja sama internasional juga sangat penting dalam mengatasi masalah ini, karena migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia seringkali melibatkan banyak negara. Keseluruhan, mengelola implikasi terhadap keamanan nasional dari migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia memerlukan pendekatan yang berimbang untuk menjaga stabilitas negara sambil memperhatikan aspek kemanusiaan dan keamanan nasional secara bersamaan.

## **F. Upaya Penegakan Hukum**

Upaya penegak hukum dalam mengatasi penyelundupan manusia telah menjadi prioritas penting di tingkat nasional dan internasional. Penyelundupan manusia adalah tindakan ilegal yang merugikan banyak individu dan masyarakat, dan upaya untuk memeranginya melibatkan berbagai aspek. Salah satu langkah utama dalam penegakan hukum adalah meningkatkan kerja sama antara negara-negara, karena penyelundupan manusia sering melibatkan lintas batas negara. Negara-negara seringkali melakukan



pertukaran informasi intelijen dan berkoordinasi dalam operasi penegakan hukum bersama untuk mengidentifikasi jaringan penyelundup manusia dan mengejar mereka hingga ke akar masalahnya. Selain itu, penegakan hukum juga melibatkan pelatihan yang ditingkatkan bagi aparat penegak hukum untuk memahami taktik, teknik, dan pola yang digunakan oleh penyelundup manusia. Ini membantu mereka dalam melakukan penyelidikan yang lebih efektif dan mengambil tindakan penegakan hukum yang lebih tepat.

Peran pengawasan perbatasan yang ketat juga merupakan bagian penting dalam upaya penegakan hukum. Peningkatan teknologi dan peralatan untuk deteksi pergerakan manusia ilegal dapat membantu mencegah penyelundupan manusia di awal prosesnya. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan badan-badan internasional seperti Interpol dan Frontex untuk mengkoordinasikan operasi pengawasan perbatasan. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia diatasi oleh beberapa instansi sebagai baris terdepan, yaitu Kepolisian dan Dirjen Imigrasi. Penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana penyelundupan manusia, Kepolisian harus bisa dalam memilah bermacam modus operasi yang dikerjakan oleh para pelaku penyelundup beserta imigran yang akan diselundupkan. Sebagaimana dalam hukum pidana dikenal istilah pelaku tindak pidana, korban tindak pidana. Namun dalam undang-undang Keimigrasian tidak menjelaskan mengenai korban tindak pidana, karena dalam pelanggaran ataupun tindak pidana keimigrasian tidak terdapat korban manusia yang dirugikan, akan tetapi pihak yang dirugikan adalah negara (Salam, 2020).

Selain itu, upaya penegakan hukum juga mencakup perlindungan terhadap korban penyelundupan manusia. Korban seringkali memerlukan bantuan medis, psikologis, dan sosial, serta perlindungan dari potensi pembalasan dari pihak penyelundup. Oleh karena itu, negara-negara juga harus fokus pada rehabilitasi dan perlindungan korban untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban sekali lagi. Pentingnya upaya penegakan hukum dalam mengatasi penyelundupan manusia tidak dapat diabaikan, dan kerja sama internasional serta koordinasi yang baik antarlembaga penegak hukum adalah kunci dalam mencapai hasil yang lebih efektif dalam memerangi fenomena ini.

Tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengatasi penyelundupan manusia adalah kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah sifat transnasional dari penyelundupan manusia, yang melibatkan lintas batas negara. Para penyelundup seringkali beroperasi di berbagai negara, yang membuat sulit untuk mengejar mereka melalui yurisdiksi yang berbeda. Hal ini membutuhkan kerja sama yang erat antara negara-negara dan berbagi informasi intelijen yang tepat. Selain itu, penyelundupan manusia seringkali terkait dengan jaringan kriminal yang kuat dan kompleks. Para pelaku menggunakan taktik rahasia dan beralih dengan cepat untuk menghindari penangkapan. Ini memerlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam melacak dan mengidentifikasi jaringan tersebut serta mengejar mereka secara efektif.

Tantangan lainnya adalah perlindungan terhadap korban penyelundupan manusia. Banyak korban yang terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya dan mungkin takut untuk melaporkan pelaku kepada pihak berwenang. Upaya penegakan hukum harus dilakukan dengan sensitivitas terhadap keadaan korban dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan, bantuan medis, dan dukungan psikologis yang diperlukan.

Tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengatasi penyelundupan manusia semakin rumit dengan berkembangnya dinamika sosial, teknologi, dan politik di seluruh dunia. Salah satu tantangan kunci adalah adaptasi penyelundup manusia terhadap teknologi modern. Mereka menggunakan komunikasi digital yang terenkripsi, aplikasi perpesanan, dan platform online untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan aliran migran ilegal dengan lebih rahasia. Hal ini membuat sulit bagi penegak hukum untuk melacak aktivitas mereka secara efektif. Lingkungan politik yang tidak stabil di beberapa wilayah dapat menciptakan ruang gerak yang lebih besar bagi penyelundup manusia. Ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan perubahan rezim dapat memicu aliran migrasi besar-besaran, dan para penyelundup seringkali memanfaatkan situasi ini untuk memperluas operasi mereka. Penegakan hukum juga bisa menjadi lebih sulit dalam konteks ini karena pengaturan negara sering kali terpengaruh oleh perubahan politik.

Pada dasarnya ada tiga kebijakan yang digunakan dalam menangani penyelundupan manusia (people smuggling), yaitu border controls, deportation and legalization policies, dan work-site inspections, raids, and sanctions against employers or illegal immigrants (Saifullah, 2013).

1. Pertama, kebijakan kontrol perbatasan (border controls) ditujukan untuk membatasi ruang gerak dari imigran gelap dan agen penyelundup.
2. Kedua, kebijakan deportasi dan pengabsahan kebijakan di Indonesia dalam pelaksanaannya, deportasi tidak dapat dilaksanakan jika belum ada status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR sehingga dibutuhkan suatu pengesahan kebijakan dari pemerintah RI terkait status para imigran tersebut.
3. Ketiga, kebijakan Pemeriksaan dan Tinjauan terhadap Lokasi Pekerjaan, melakukan penggerebekan, dan sanksi yang tegas terhadap para pelaku agen.

Di samping itu, dalam mengatasi tantangan ini negara-negara juga perlu berinvestasi dalam pelatihan dan teknologi yang diperlukan bagi aparat penegak hukum, meningkatkan kerja sama internasional, dan mendorong pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan penyelundupan manusia. Upaya ini harus selalu diiringi dengan komitmen untuk melindungi hak asasi manusia korban penyelundupan manusia dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Fenomena migrasi manusia dan juga penyelundupan manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan nasional Indonesia. Dalam perspektif kriminologi, penelitian ini mengungkapkan bahwa fenomena ini tidak hanya merupakan masalah sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi kriminal yang kuat. Migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia menciptakan berbagai masalah, termasuk ketidakpastian sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan kompleks dalam menjaga stabilitas negara sambil melindungi hak asasi manusia dan memerangi kejahatan transnasional.

Kerja sama internasional terbukti sangat penting dalam mengatasi masalah ini, dan upaya bersama antarnegara diperlukan untuk mengidentifikasi, menangkap, dan menghukum pelaku ilegal, serta melindungi korban penyelundupan manusia. Dalam menangani fenomena migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia, pendekatan yang holistik yang menggabungkan aspek kemanusiaan, penegakan hukum, dan kebijakan keamanan nasional harus diterapkan. Untuk menghadapi ancaman keamanan nasional yang disebabkan oleh migrasi manusia ilegal dan penyelundupan manusia, Indonesia harus terus memperkuat kapasitas penegakan hukumnya, meningkatkan kerja sama internasional, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam mobilitas lintas batas. Dengan demikian, negara dapat mencapai keseimbangan yang baik antara keamanan nasional dan kemanusiaan dalam menghadapi fenomena ini.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Migrasi Manusia dan Penyelundupan Manusia sebagai Ancaman Keamanan Nasional di Indonesia.

#### DAFTAR RUJUKAN

- (IOM), I. O. (2012). Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia).
- Akbar, R. S. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG TURUT SERTA DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 41.
- Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California
- Laily, I. N. (2022, Januari 26). Migrasi adalah Perpindahan Penduduk, Pahami Penyebab dan Macamnya. Retrieved from katadata.co.id: <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61f0c7e03f3bb/migrasi-adalah-perpindahan-penduduk-pahami-penyebab-dan-macamnya>

- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Saifullah. (2013). Refleksi Sosiologi Hukum. Bandung: Refika Aditama.
- Salam, E. A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 9-20.
- UNODC. (2021). Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia.